



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2023

**Email: diklat.provsumbar@gmail.com
Website: diklat.sumbarprov.go.id**

Profesional dalam Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat dapat selesai sesuai waktunya. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, atas jasa beliau kita dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam.

Renja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah, dan menjadi tahun perencanaan terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rancangan Renja disusun setidaknya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu teknokratik dan top-down, yaitu rancangan Renja disusun oleh para teknokrat sesuai dengan keahliannya namun tetap harus mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya. Maka dari itu, rancangan renja ini merupakan hasil dari kerjasama tim penyusun Renja yang berasal dari bidang-bidang dan sekretariat BPSDM. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan dokumen perencanaan ini tidak luput dari kekhilafan, maka kritik dan saran yang membangun diperlukan sehingga dokumen ini menjadi sempurna. Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat.

Padang, Juni 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. BUSTAVIDIA, MM
NIP. 19640501 199303 1 006

DAFTAR ISI

| | hlm |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | <i>i</i> |
| DAFTAR ISI | <i>ii</i> |
| DAFTAR TABEL | <i>iii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 28 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 29 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 32 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 37 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN | 48 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 39 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 40 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 40 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 44 |
| 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan | 44 |
| BAB V PENUTUP | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 1.1 | 76 |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |
| Tabel | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan menjadi panduan suatu SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk satu tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi SKPD tersebut dalam kerangka visi dan misi daerah.

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan pemerintah pusat di bidang pengembangan sumber daya manusia.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dengan Bidang-Bidang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa program dan kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian kinerja serta rencana pendanaan indikatif.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya merupakan instrumen untuk memandu pemangku kepentingan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kinerja organisasi. Pelaksanaan rencana kerja yang baik akan tergambarkan pada sejauh mana capaian indikator kinerja dapat diwujudkan.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, maka dilakukan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditentukan pada penetapan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Hasil dari perbandingan tersebut menjadi ukuran bagi suatu organisasi untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2021 yang berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Adapun besaran alokasi anggaran dan realisasi keuangan dalam mencapai target kinerja dengan 3 sasaran strategis sesuai penetapan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

| No | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Rp. | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 12.771.310.045 | 12.374.591.788 | 96,89 |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.883.400 | 28.874.700 | 87,81 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.034.262.631 | 8.893.412.311 | 98,44 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 94.577.000 | 88.013.800 | 93,06 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 508.576.194 | 474.752.540 | 93,35 |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 249.202.480 | 247.645.000 | 99,38 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.089.431.900 | 1.914.480.525 | 91,63 |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 762.376.440 | 727.412.912 | 95,41 |
| II. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5.809.791.510 | 5.006.939.899 | 86,18 |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis | 550.005.350 | 492.872.842 | 89,61 |
| 2 | Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 5.259.786.160 | 4.514.067.057 | 85,82 |
| Jumlah | | 18.581.101.555 | 17.381.531.687 | 93,54 |

Sumber: Laporan Simbangda atas Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Prov. Sumatera Barat Tahun 2021

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 7 kegiatan merupakan program untuk mewujudkan sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kediklatan. Program ini pada APBD tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.771.310.045,- Penyerapan anggaran pada program ini sangat baik sekali, dimana persentase mencapai 96,89%. Dimana dari 7 kegiatan, 6 kegiatan realisasi anggarannya diatas 90%. Hanya 1 kegiatan yang realisasinya 87,81%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi terhadap belanja penggandaan dokumen yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Alokasi anggaran program ini digunakan untuk pembiayaan 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021

| No. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | ANGGARAN | REALISASI | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.883.400 | 28.874.700 | 87,81 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.826.400 | 14.693.600 | 82,43 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.057.000 | 14.181.100 | 94,18 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| II. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.034.262.631 | 8.893.412.311 | 98,44 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.716.235.681 | 8.598.944.061 | 98,65 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 281.428.000 | 263.270.000 | 93,55 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 16.870.650 | 12.537.100 | 74,31 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 19.728.300 | 18.661.150 | 94,59 |
| III. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 94.577.000 | 88.013.800 | 93,06 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 57.000.000 | 56.992.400 | 99,99 |
| 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 37.577.000 | 31.021.400 | 82,55 |
| IV. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 508.576.194 | 474.752.540 | 93,35 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 49.362.850 | 49.294.603 | 99,86 |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 120.672.344 | 102.919.900 | 85,29 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 35.409.000 | 25.945.250 | 73,27 |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.200.000 | 12.600.000 | 95,45 |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 289.932.000 | 283.992.787 | 97,95 |
| V. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 249.202.480 | 247.645.000 | 99,38 |
| | Pengadaan Mebel | 175.354.400 | 174.185.000 | 99,33 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 73.848.080 | 73.460.000 | 99,47 |
| VI. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.089.431.900 | 1.914.480.525 | 91,63 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.294.250 | 7.152.500 | 58,18 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 742.448.000 | 638.257.915 | 85,97 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.334.689.650 | 1.269.070.110 | 95,08 |
| VII. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 762.376.440 | 727.412.912 | 95,41 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 124.390.000 | 105.633.128 | |
| 2 | Pemeliharaan Mebel | 8.800.000 | 8.800.000 | |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 629.186.440 | 612.979.784 | |
| TOTAL | | 12.771.310.045 | 12.374.591.788 | 98,62 |

Sumber: Laporan Simbanga atas Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Prov. Sumatera Barat Tahun 2021

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan program untuk mewujudkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu Meningkatnya pengembangan kompetensi dan kualifikasi aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp5.809.791.510,-. Secara keseluruhan program ini telah menyerap anggaran sebesar Rp5.006.939.899,- atau 86,18%. Alokasi anggaran program ini digunakan untuk pembiayaan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021

| No. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | ANGGARAN | REALISASI | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis | 550.005.350 | 492.872.842 | 89,61 |
| 1 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 550.005.350 | 492.872.842 | 89,61 |
| II. | Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 5.259.786.160 | 4.514.067.057 | 85,82 |
| 1 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 33.024.000 | 29.440.900 | 89,15 |
| 2 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 355.103.900 | 320.379.152 | 90,22 |
| 3 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | 96.749.800 | 81.125.850 | 83,85 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 4.512.920.410 | 391.046.5963 | 86,65 |
| 5 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 261.988.050 | 172.655.192 | 65,90 |
| TOTAL | | 5.809.791.510 | 5.006.939.899 | 86,18 |

Serapan anggaran untuk program ini mencapai 86,18%. Capaian ini kurang memuaskan disebabkan terdapat silpa yang cukup besar dari sisa honorarium narasumber. Hal ini karena honorarium dari Widyaiswara dibayarkan setelah kewajiban mengajar sebanyak 21 JP dipenuhi, sementara untuk memprediksi berapa kelebihan jam mengajar widyaiswara ini cukup sulit, karena tidak bisa diketahui secara pasti sampai kegiatan diklat selesai dilaksanakan. Dan juga honorarium narasumber yang berasal dari BPSDM berdasarkan Peraturan Gubernur tentang standar biaya hanya boleh dibayarkan 50%, sedangkan dalam penganggaran di menu SIPD tetap dianggarkan penuh.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai 4 indikator kinerja tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.581.101.555,- untuk melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Dari anggaran tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mampu mewujudkan kinerja tersebut dengan capaian kinerja **109,06 %**.

Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (71) | BB (70,93) | 99,90% |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 | 95,24 | 112,04% |
| Meningkatnya pengembangan kompetensi dan kualifikasi aparatur | 1. Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun | 6,0 | 6,58 | 109,66% |
| | 2. Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan | 84 | 96,33 | 114,67% |
| Rata-rata Kinerja | | | | 109,06% |

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya sebagai SKPD dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat harus mampu menyediakan pelayanan kediklatan bagi setiap PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan indikator yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2021 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase jumlah ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun.
3. Persentase lulusan diklat dengan prediket minimal memuaskan

Dan ketiga indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 rata rata pencapaian target sangat baik. Dari 3 indikator kinerja seluruh realisasinya melebihi target. Hal ini tentunya cukup menggembirakan mengingat dengan keterbatasan anggaran serta sarana prasarana yang ada, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tetap bisa memberikan pelayanan yang cukup memuaskan kepada Aparatur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, baik itu ASN lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat minimal 20 JP/Tahun target yang ditetapkan memang masih tergolong kecil, hal ini dikarenakan melihat perkembangan anggaran yang didapatkan oleh BPSDM dalam 3 tahun terakhir tidak ada kenaikan secara signifikan. Walaupun amanat Undang-Undang telah menyatakan pembagian porsi anggaran pengembangan sumber daya manusia, namun karena kondisi kebutuhan dan prioritas daerah maka alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia belum bisa terakomodir sesuai kebutuhan. Sehingga masih sulit mencapai jumlah PNS yang mendapatkan pelatihan minimal 20 JP/Tahun dengan target yang lebih tinggi untuk seluruh aparatur Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut.

Dari hasil capaian terhadap 3 sasaran dengan 4 indikator, didapatkan rata-rata capaian kinerja 109,06%, dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 120,43%, memang terjadi penurunan, tetapi kalau dilihat per indikator persentase capaian 3 indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, hanya 1 indikator yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu indikator Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun.

Dengan kondisi jumlah pegawai yang berkurang dibandingkan dengan tahun 2020, namun BPSDM mampu memberikan kinerja yang lebih baik, hal ini karena adanya keinginan bersama untuk terus memperbaiki kekurangan dan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada meski dengan anggaran yang terbatas dan dilakukan secara bertahap

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu OPD yang menjalankan tugas untuk mewujudkan misi kedua gubernur yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional dengan indikator sasaran yaitu Meningkatnya Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Meningkatnya Jumlah Aparatur Mengikuti Diklat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk bisa mewujudkan misi ini, perlu dilakukan intervensi yang sesuai dengan konteks aktual agar kinerja dapat diukur. Konteks aktual tersebut akan tergambarkan dalam isu-isu penting dan pokok permasalahan yang dihadapi untuk

bisa diintervensi agar visi gubernur dapat dicapai. Adapun isu-isu penting dan pokok permasalahan yang dihadapi dalam visi dan misi gubernur adalah:

a. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya. Kesenjangan kebutuhan kompetensi jabatan dengan kualifikasi pejabat pelaksana ini akan tergambar pada kemampuan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adapun pokok permasalahan yang menyebabkan munculnya isu penting tersebut adalah:

- 1) Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan
- 2) Calon Pegawai Negeri Sipil Kab/Kota dan instansi vertikal masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
- 3) Masih minimnya pelatihan teknis untuk menyokong tugas aparatur, dan stakeholder seperti Wali Nagari dan kepala desa, serta Anggota DPRD terpilih. Hal ini perlu disikapi dengan merencanakan diklat-diklat yang berhubungan dengan hal-hal teknis seperti pengelolaan keuangan, manajemen perkantoran, penatausahaan asset dan lainnya.
- 4) Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendah.

Terdapat 5.944 orang pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar diseluruh OPD. Keahlian dan keterampilan yang terbatas dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD. Disamping itu juga sering dijumpai naskah dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan sulitnya OPD mempublikasikan kinerjanya melalui website.

- 5) Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam

Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu. Oleh sebab itu agar pelaksanaan pekerjaan PNS menjadi lebih terstandar dan terukur hendaknya PNS tersebut dipersiapkan untuk menjadi Pejabat Fungsional Tertentu dengan menyediakan diklat pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Walaupun pejabat fungsional sudah dibentuk, perlu juga disediakan diklat untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional tersebut. Begitu juga dengan guru SLTA yang dialihkan ke provinsi, sesuai dengan program prioritas nasional, perlu juga disediakan diklat dalam rangka pengembangan kompetensi guru tersebut.

- b. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan impassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), setiap PNS yang akan menjadi JFT harus lulus ujian kompetensi yang disyaratkan oleh jabatan tersebut. Untuk itu perlu dipersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi jabatan tersebut.

- c. Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina kediklatan telah menetapkan standar sarana dan prasarana pelaksanaan kediklatan. Pada BPSDM, sebagian besar sarana dan prasarana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan diklat. Jumlah ruang belajar dan asrama sudah tidak memadai untuk menyelenggarakan diklat secara simultan lebih dari 160 orang. Sementara itu untuk bisa mencapai kinerja 20 JPL/orang/pertahun, setidaknya diperlukan asrama dan ruang kelas dengan standar kelengkapannya untuk 350 orang agar bisa mendiklatkan 1300 orang dalam satu tahun.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan telaah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian daerah yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan

Aspek penting yang terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintah adalah perlunya membangun karakter aparat birokrasi agar terjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual sehingga pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada pengembangan moralitas/karakter

2. Prioritas pembangunan untuk Tahun 2023 dititikberatkan kepada program unggulan Kepala Daerah. Demikian juga dengan Pokir DPRD yang seluruhnya diarahkan untuk pencapaian target program unggulan.

3. Permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan BPSDM adalah:

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur
- 2) Profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik pada pendidikan formal dan non formal perlu ditingkatkan lagi
- 3) Tingkat produktivitas PNS masih rendah
- 4) Kualitas pelayanan publik yang masih rendah

4. Permasalahan yang berkaitan dengan fungsi Pendidikan dan Pelatihan

1) Penyelenggaraan evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan merujuk kepada proses pengumpulan hasil yang diperlukan untuk menentukan efektifitas pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan yang benar akan berfungsi sebagai kendali dalam pelaksanaan program diklat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2) Penyelenggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata. Keberadaan Aparatur Sipil Negara di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar

tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi, dedikasi dan integritas yang dimiliki dan dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara.

- 3) Rendahnya waktu lama diklat yang diikuti aparatur. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional kepada seluruh aparatur. Namun hingga saat ini, rata-rata aparatur yang mengikuti diklat masih rendah, sehingga berpengaruh kepada peningkatan kapasitas aparatur itu sendiri.
- 4) Masih kurangnya sumber daya kediklatan yang modern dan profesional. Widyaiswara merupakan motor penggerak utama dalam pengembangan sumber daya manusia pada masing-masing daerah. Hingga saat ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSDM) Provinsi Sumatera Barat memiliki 23 orang Fungsional Tertentu (Widyaiswara). Jumlah tersebut dirasa masih kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan dalam Diklat terhadap Widyaiswara ini. Terdapat banyak kegiatan kediklatan yang harus ditangani oleh Widyaiswara antara lain diklat prajabatan, diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional. Selain itu, Widyaiswara pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat juga melayani kebutuhan kediklatan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5) Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat.

Untuk program unggulan RPJMD didalam RKPD Tahun 2023, dimana salah satu program unggulan tersebut adalah “Sumbar Sehat dan Cerdas”. Dengan bentuk program Seribu Beasiswa Kuliah di Perguruan Tinggi Terbaik di Dalam dan Luar Negeri. Berkaitan dengan program unggulan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkontribusi melalui kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Kapasitas Aparatur, dengan pemberian bantuan kepada ASN yang Tugas Belajar berupa uang buku, uang penelitian, dan uang saku. Namun untuk Tahun 2022 kewenangan untuk pemberian izin belajar dan tugas belajar dikembalikan kepada Badan Kepegawaian Daerah. Sehingga kemungkinan untuk pemberian bantuan ini

nantinya tidak dapat lagi dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, karena sudah tidak menjadi kewenangan.

Berdasarkan berbagai permasalahan baik yang telah diuraikan sebelumnya pada isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi OPD dan permasalahan yang telah dituangkan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, Adapun program tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada tabel berikut:

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----------|---|---------------|--|----------------|-----------------------|---|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 14.076.219.350 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 15.180.263.000 | |
| 1 | Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 102.754.178 | Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 42.884.700 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 9.493.127.384 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 9.332.273.362 | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 60 | 60.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 60 | 60.000.000 | |
| 4 | Administrasi Pendapatan Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi | 60 | 50.000.000 | Administrasi Pendapatan Daerah | Padang | Persentase Tertib Administrasi | 60 | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kewenangan Perangkat Daerah | | Pendapatan Daerah | | | Kewenangan Perangkat Daerah | | Pendapatan Daerah | | | |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 335.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 335.000.000 | |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 836.010.500 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 886.000.000 | |
| 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 700.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 705.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 2.720.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 2.720.000.000 | |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 2.084.266.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Padang | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 60 | 1.049.104.938 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------------|---|---------------|--|----------------|-----------------------|---|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan | |
| | | | | | | | | | | Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | Padang | Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan | | 10.420.403.700 | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | Padang | Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan | | 7.162.278.000 | |
| 1 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Padang | Terlaksananya diklat teknis bagi ASN Provinsi Sumatera Barat | 210 | 1.256.958.000 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Padang | Terlaksananya diklat teknis bagi ASN Provinsi Sumatera Barat | 240 org | 1.256.958.000 | |
| 2 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Padang | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat | 20 JP/Tahun | 5.905.320.000 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Padang | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat | 20 JP/Tahun | 5.905.320.700 | |
| | Jumlah anggaran | | | | 23.543.436.062 | | | | | 22.342.541.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat secara institusi kelembagaan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat umum, namun yang menjadi customer Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat adalah aparatur dan stakeholder tertentu, yaitu peningkatan kompetensi untuk aparatur lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, peningkatan kompetensi untuk aparatur Kabupaten/Kota dengan pola kontribusi maupun pola fasilitasi, serta peningkatan kompetensi untuk stakeholder selain aparatur seperti Anggota DPRD, Walinagari dan perangkat nagari. Sehingga secara langsung usulan program dan kegiatan dari unsur kemasyarakatan tidak ada. Pada tahun sebelumnya berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan cukup banyak usulan kegiatan dengan pola kontribusi yang masuk. Namun dengan terjadinya Pandemi Covid 19 yang mewabah hampir ke seluruh wilayah Sumatera Barat, membuat daerah Kabupaten/Kota memprioritaskan kegiatan kepada sektor-sektor penting yang vital seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2023 dan Forum OPD yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2022, untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat masih terbatas untuk pengembangan kompetensi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga kerjasama untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat hanya melalui pola kontribusi dan fasilitasi antara lain :

Kegiatan Pola Kontribusi Tahun Anggaran 2023

| No. | Nama Kegiatan | Pola Kegiatan | Keterangan |
|-----|--|---------------|---|
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Kontribusi) | Kontribusi | Direncanakan untuk seluruh Kabupaten/Kota |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Kontribusi) | Kontribusi | Direncanakan untuk seluruh Kabupaten/Kota |
| 3 | Diklat Pelatihan Dasar Bagi CPNS Gol II (Kontribusi) | Kontribusi | Direncanakan untuk seluruh |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | Kabupaten/Kota |
| 4 | Diklat Pelatihan Dasar Bagi CPNS Gol III (Kontribusi) | Kontribusi | Direncanakan untuk seluruh Kabupaten/Kota |

Kegiatan diatas dimunculkan untuk dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan pola kontribusi yang kemungkinan muncul setelah perencanaan akhir ditetapkan, terutama diklat pelatihan dasar untuk CPNS dimana kuota penerimaan CPNS ini informasinya belum bisa dipastikan ada atau tidaknya pada saat draft Renja disusun.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rancangan awal RKPD tahun 2023, terdapat 7 prioritas nasional, yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Walaupun secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memang tidak terkait erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Namun pada sisi pelaksanaan tugas penunjang (suporting), keberadaan BPSDM mempunyai peran besar untuk menyukseskan kebijakan pembangunan nasional. Terutama pada Prioritas Nasional ke 3 yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi aparatur demi terwujudnya aparatur yang kompeten dan professional.

Di samping hal tersebut diatas, setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah terjadi perubahan mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, dimana setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensinya setiap tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, secara nyata menyampaikan bahwa setiap PNS wajib mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran setiap tahun. Sehingga hal ini perlu persiapan bagi daerah untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya target kinerja Tahun 2022 dan kesesuaian tingkat pendidikan dan jenis pelatihan dengan persyaratan tugas aparatur.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, adalah :

1. Meningkatnya persentase jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat mengikuti pelatihan minimal 20 JP / tahun.
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan nilai kelulusan peserta diklat.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan, telah dilakukan penelaahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPSDM. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan pergeseran paradigma perencanaan dari *money follow functions* ke *money follow programs*. Aturan hukum tetap menjadi acuan utama untuk melihat dasar kewenangan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. Namun aturan hukum tidak menjadi patron utama dalam melahirkan program dan kegiatan. Sehingga dengan paradigma ini, setiap program dan kegiatan yang dilahirkan akan bermanfaat besar terhadap permasalahan yang muncul ditengah kehidupan pemerintahan.

Upaya penciptaan program dan kegiatan tersebut juga dalam rangka memenuhi kewajiban BPSDM dalam mengembangkan kompetensi aparatur sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu mencapai paling sedikit 20 JP lamanya setiap PNS provinsi Sumatera Barat mengikuti pelatihan dalam satu tahun. Dalam usulan program dan kegiatan ini, hakikatnya terjadi perbedaan yang cukup mendasar antara usulan program kegiatan dengan program kegiatan yang tertampung dalam rancangan awal RKPD. Hal ini terjadi, disamping yang telah

diuraian di atas, juga besar disebabkan terjadinya perubahan nomenklatur Badan Diklat menjadi BPSDM yang notabene kewenangannya menjadi lebih luas dan ruang lingkup permasalahan yang harus diselesaikan juga menjadi luas. Sehingga untuk persiapan permulaan untuk mengantisipasi kebutuhan mendasar dimasa akan datang, diperlukan anggaran yang lebih besar, maka seluruh kegiatan yang dilahirkan baik dari hasil pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top-down, maupun partisipatif dengan melakukan forum OPD, untuk menyelesaikan permasalahan kerja tahun 2022, sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019, disusun dalam 2 (dua) program, yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- I.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - I.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- I.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - I.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - I.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - I.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - I.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- I.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - I.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - I.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- I.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - I.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - I.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - I.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

I.5.1. Pengadaan Mebel

I.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

I.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

I.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

I.7.2. Pemeliharaan Mebel

I.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

II.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

II.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

II.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

II.2.1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

II.2.2. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

II.2.3. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

II.2.4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

II.2.5. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Renja 2023 ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang terhimpun dengan total anggaran sebesar Rp. 22.342.541.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)..

Dari rencana pembiayaan program Pengembangan SDM sebesar 7.162.278.000 tersebut, sebesar Rp 1.694.200.000 direncanakan dari kegiatan kontribusi, dimana pembiayaan kegiatan berasal dari dana kontribusi yang disetorkan oleh Kabupaten/Kota yang mengirim aparaturnya mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka sinergi kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Selanjutnya untuk kegiatan lain bersumber kepada dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk dana APBN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat pernah mendapatkan kucuran dana yang berasal dari dana dekonsentrasi dari pusat, yaitu untuk pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Aparatur. Namun sumber dana tersebut tidak rutin didapatkan, sehingga sampai saat ini pelaksanaan kegiatan sangat bergantung kepada dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk sumber dana yang berasal dari kontribusi pun belum bisa diandalkan, karena keterbatasan anggaran Kabupaten/Kota untuk anggaran biaya pengembangan kompetensi aparatur dengan pola kontribusi. Oleh karena itu

Program dan kegiatan yang disusun harus berdasarkan skala prioritas, dimana pada saat penyesuaian anggaran dan kegiatan dengan angka anggaran yang terdapat pada KUA PPAS dapat dilakukan pemotongan kegiatan dengan skala prioritas.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

| KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2023 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 | |
|------|----|----|------|--|---|--|--------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET | Rp | SUMBER DANA | | Target | Rp |
| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 04 | | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi | | 60% | 15.180.263.000 | | | | 15.553.356.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | | 100% | 42.884.700 | | | | 48.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | PADANG | 4 dokumen | 16.534.400 | APBD | | 4 dokumen | 18.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | PADANG | 3 dokumen | 16.350.300 | APBD | | 3 dokumen | 18.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | 100% | 9.332.273.362 | | | | 9.354.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | PADANG | 82 orang | 9.003.372.712 | APBD | | 82 orang | 9.010.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | PADANG | 15 orang | 280.000.000 | APBD | | 15 orang | 290.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan | PADANG | 12 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 12 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | PADANG | 1 dokumen | 18.900.650 | APBD | | 1 dokumen | 20.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--------|--|-------------------|------|--|--|-------------------|
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan | PADANG | 14 dokumen | 20.000.000 | APBD | | 14 dokumen | 22.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | | 100% | 60.000.000 | | | | 70.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun | PADANG | 2 dokumen | 15.000.000 | APBD | | 2 dokumen | 18.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1. Jumlah tanda letak tanah yang dibangun 2. Jumlah tanda kepemilikan tanah 3. Jumlah unit yang dilakukan penjagaan 4. Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun 5. Jumlah dokumen pengamanan Hukum 6. Jumlah BMD yang diasuransikan 7. Jumlah tanah yang bersertifikat | PADANG | 1. 10 set 2. 2 set 3. 8 unit 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 5 unit 7. 1 persil | 10.000.000 | APBD | | 1. 10 set 2. 2 set 3. 8 unit 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 5 unit 7. 1 persil | 12.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban 2. Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya | PADANG | 1 dokumen 3 orang | 20.000.000 | APBD | | 1 dokumen 3 orang | 22.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah | PADANG | 1 dokumen | 10.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 12.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah | | 100% | 50.000.000 | | | | 56.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|--|---|-------------|------------------------|-------------|------|------------------------|--------------------|
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah | PADANG | 1 dokumen | 15.000.000 | APBD | 1 dokumen | 16.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 1. Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah 2. Jumlah Kebijakan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah | PADANG | 1 dokumen 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | 05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah | PADANG | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | 1 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah | PADANG | 1 dokumen | 20.000.000 | APBD | 1 dokumen | 22.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | 335.000.000 | | | | 366.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | PADANG | 100 stel | 130.000.000 | APBD | 100 stel | 140.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 2. Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll) | PADANG | 3 dokumen 2 dokumen | 5.000.000 | APBD | 3 dokumen 2 dokumen | 6.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building | PADANG | 15 orang 82 orang | 100.000.000 | APBD | 15 orang 82 orang | 110.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimtek yang dilaksanakan | PADANG | 10 kali | 100.000.000 | APBD | 10 kali | 110.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 886.000.000 | | | | 940.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--------|---|----------------------|------|--|---|----------------------|
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | PADANG | 100 unit | 70.000.000 | APBD | | 100 unit | 80.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | PADANG | 9 jenis | 150.000.000 | APBD | | 9 jenis | 160.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | PADANG | 4 jenis | 60.000.000 | APBD | | 4 jenis | 70.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | PADANG | 2 Jenis | 16.000.000 | APBD | | 2 Jenis | 30.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | PADANG | 40 dokumen | 580.000.000 | APBD | | 40 laporan | 590.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah | Jumlah arsip dinamis Perangkat Daerah yang dikelola | PADANG | 12 arsip | 10.000.000 | APBD | | 12 arsip | 10.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | | 100% | 705.000.000 | | | | 816.309.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Meubel | PADANG | 8 Jenis | 205.000.000 | APBD | | 8 Jenis | 306.309.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | PADANG | Komputer 30 Unit Peralatan Kantor 5 unit | 500.000.000 | APBD | | Komputer 30 Unit Peralatan Kantor 5 unit | 510.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 2.720.000.000 | | | | 2.790.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | PADANG | 750 surat | 20.000.000 | APBD | | 750 surat | 30.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1. Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan 2. Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 3. Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 4. Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan | PADANG | 6000 meter kubik, 370000 Kwh, 50 Mbps, 1 rekening | 850.000.000 | APBD | | 6000 meter kubik, 370000 Kwh, 50 Mbps, 1 rekening | 860.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|---|---|--------|---------------------|----------------------|------|--|------------|----------------------|
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia | PADANG | 35 orang | 1.850.000.000 | APBD | | 35 orang | 1.900.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | 100% | 1.049.104.938 | | | | 1.113.047.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | PADANG | 14 Unit | 200.000.000 | APBD | | 14 Unit | 220.000.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebel | PADANG | 85 jenis | 50.000.000 | APBD | | 85 jenis | 93.047.000 |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab | PADANG | 100 unit | 799.104.938 | APBD | | 100 unit | 800.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | Aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan | | 60% | 7.162.278.000 | | | 60% | 7.338.309.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | Jumlah dokumen Pengembangan kompetensi teknis yang dilakukan | | 7 dokumen | 1.256.958.000 | | | | 1.345.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | PADANG | 210 orang | 1.211.958.000 | APBD | | 210 orang | 1.300.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1. Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilakukan 2. Jumlah laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang disusun | PADANG | 8 kali 1 laporan | 45.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 45.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 5 | 04 | 02 | 1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan | Padang | 12 dokumen | 5.905.320.000 | APBD | | 20 JPL/Tahun | 5.993.309.000 |
|---|----|----|------|---|---|---|-------------|---|---------------|------|--|--------------|---------------|
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional | 1. Jumlah dokumen kebijakan teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama yang disusun 2. Jumlah dokumen kebijakan teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan yang disusun 3. Jumlah dokumen kebijakan teknis dan Rencana Jabatan Fungsional yang disusun | Padang | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100.000.000 | APBD | | 20 JPL/Tahun | 100.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | Jumlah lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang dikelola | Bukittinggi | 1 lembaga | 100.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi kompetensi | PADANG | 90 orang | 200.000.000 | APBD | | 90 orang | 200.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 1. Jumlah sertifikat/regulasi akreditasi kelembagaan yang diperoleh 2. Jumlah ASN Tenaga Pengembang Kompetensi yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi 3. Jumlah Sumber belajar yang dikelola | PADANG | 1 dokumen 30 orang 2 sumber belajar | 650.000.000 | APBD | | 6 Kegiatan | 650.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | 1. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri/luar Negeri Dibidang Pengembangan Kapasitas 2. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri/luar Negeri Dibidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur | PADANG | 1 Dokumen 1 dokumen | 150.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 150.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--------|------------------------------------|-----------------------|------|--|---|-----------------------|
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 2. Jumlah Administrator dan Pengawas yang mengikuti pengembangan Kompetensi Kepemimpinan 3. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Prajabatan | PADANG | 210 orang 204 diklat manajerial | 4.555.320.000 | APBD | | 210 diklat fungsional, 204 diklat manajerial | 4.625.320.000 |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah laporan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang dilakukan | PADANG | 3 laporan | 150.000.000 | APBD | | 3 dokumen | 167.989.000 |
| | | | | | | | | | 22.342.541.000 | | | | 22.891.665.000 |

BAB V

PENUTUP

3.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 2023

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra BPSDM Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Namun ketersediaan anggaran yang diakomodir dalam dokumen RPJMD belum mampu menampung seluruh kegiatan yang diusulkan melalui dokumen Renja. Pada tahapan penyusunan KUA PPAS kegiatan yang diusulkan akan kembali mengerucut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu koordinasi yang lebih intens terkait kebutuhan pendanaan pengembangan sumber daya aparatur dengan Tim TAPD selaku pemegang kewenangan dalam pembagian anggaran. Arah Pembangunan tahun 2023 tetap menitikberatkan kepada target pencapaian indikator-indikator Program Unggulan Kepala Daerah.

3.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja BPSDM Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Renja BPSDM tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
- II. Penyusunan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
- III. Didalam proses penyusunannya harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan induk di atasnya diantaranya (Renstra BPSDM, RKPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJMN)
- IV. Renja BPSDM Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

3.3. Rencana Tindak Lanjut.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi bahan pembahasan selanjutnya.

Padang, Juni 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT,



Drs. BUSTAVIDIA, M.M.
NIP. 19640501 199303 1 006